

**POLITIK DAN PENDIDIKAN**  
**(Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia)**

**Mohammad Asrori**

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
e-mail: asroo.badaly@gmail.com

***Abstract:** Problems of education in Indonesia is the product of political interest of ruler, therefore they use it as a tool of authority. Education as subsystem of the state has function as supplier of educated people, it can succeed in development. In this beloved country, the reality of problems in education can not be separated from the effort to gain the authority. Therefore, educations sector is the medium for the success of the policy to achieve the goal and principal aspiration its leadership.*

***Keywords:** politic, education, Indonesia.*

**Abstrak:** Masalah pendidikan di Indonesia merupakan produk dari kepentingan politik penguasa, karena itu mereka menggunakannya sebagai alat kekuasaan. Pendidikan sebagai subsistem negara memiliki fungsi sebagai pemasok orang berpendidikan, dapat berhasil dalam pembangunan. Di negeri tercinta ini, realitas masalah dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mendapatkan otoritas. Oleh karena itu, sektor pendidikan adalah media untuk keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan aspirasi utama kepemimpinannya.

**Kata-Kata Kunci:** politik, pendidikan, Indonesia.

## **Pendahuluan**

Azra (1999: xi) mengatakan bahwa ketika mendialogkan pendidikan, realitas yang ditemukan adalah tidak dapat dipisahkan antara sistem pendidikan dengan kebijakan politik pemerintah. Hal ini dapat ditilik dari sejarah politik Islam pada masa al-Ma'mun (813 H)

sebelum kehancuran aliran Mu'tazilah yang mendapat dukungan penuh dari penguasa di mana pada saat itu studi terhadap ilmu-ilmu umum yang bertolak dari nalar dan kajian empiris marak ditemukan, bahkan negara memfasilitasi penelitian ilmiah dan pengembangan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kajian agama *ansich* tetapi juga kajian ilmiah secara umum. Namun pasca runtuhnya dominasi Mu'tazilah yang diganti penguasa ortodoksi Sunni, mulai terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Sebagai contoh pemerintahan *Nizam al-Mulk* pada tahun 1064 yang membuka *madrasah* serta *Jami'ah Nizamiah* sarat dengan kepentingan politik atau motivasi murni untuk menegakkan ortodoksi syari'ah dalam bingkai mazhab Sunni (Hasan, 2006: 77-78).

Kurikulum yang dicanangkan lebih difokuskan pada kajian agama dari pada studi umum bernuansa profetik. Dampak dari sistem tersebut ilmu fiqh menemukan mobilisasinya, tidak demikian halnya dengan ilmu kalam atau kajian empiris lainnya. Ahli fiqh-pun mendapat posisi yang agung dibandingkan ulama kalam atau lainnya (Azra, 1999: xv). Ia (Azra, 1999: xvi) juga mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di universitas al-Azhar pada masa Gamal Abdul Nasser dihapuskanlah otonomi al-Azhar sebagai benteng pemikiran untuk menangkis berbagai upaya pembaharuan dunia Islam, Nasser merombak otonomi tersebut dengan menempatkan universitas dibawah otoritasnya dan mulai melancarkan pembaharuan besar-besaran dengan menambahkan fakultas baru seperti kedokteran, teknik, pertanian, ekonomi dan sastra.

Realitas sejarah di Indonesia memberikan sinyal yang sama dari mulai jatuh banggunya negara ini pada era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan baik pada era pemerintahan Sukarno, Suharto, BJ. Habibie, Gus Dur, serta Megawati, atau bahkan SBY yang menandai adanya perubahan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan politik. Realitas tersebut tidak mengherankan bila dirujuk dari tujuan pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, maka pada dasarnya rumusan tersebut merupakan penjabaran dari politik ideologi nasional yang masuk dalam sektor pendidikan (UUD 1945 Amandemen dan Penjelasannya, 2001:6). Hal itu disebabkan Karena

pendidikan merupakan aspek pembangunan politik bangsa yang tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dan *blue print* pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mengetahui pergeseran orientasi sistem pendidikan Indonesia, tulisan ini berupaya mengkaji karakteristik sistem pendidikan Indonesia serta analisa terhadap pergeseran kebijakan tersebut, lebih-lebih pendidikan Islam. Penggunaan Metodologi penulisan ini dengan pendekatan *diskriptif-analitik-obyektif* (Mufrodi, 1980: 10).

### **Tinjauan Historis Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan**

#### **1. Pendidikan pada masa Kolonialisme Belanda dan Jepang**

Menurut Leirisa (tt: 22), untuk lebih mendalami pergeseran kebijakan pendidikan penguasa di Indonesia telah diawali dengan kebijakan pendidikan pada era kolonial Belanda. Pada masa tersebut, pendidikan diorientasikan untuk mencetak tenaga produktif yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan politik eksploitasi negara jajahan. Bagi kolonial, pendidikan rakyat sebagai problem bak buah simalakama. Apabila pendidikan tidak dikembangkan, kolonial kekurangan tenaga ahli yang mendukung tujuan politisnya. Di sisi lain, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan sumber daya manusia yang dapat menjadi bumerang bagi kekuasaan kolonial. Dalam hal ini, Raymond Kennedy, seorang sosiolog Barat mengatakan: "*Education will be a dynamit in the colonial countries*" (Tilaar, 1985: XXX).

Untuk menetralkan ancaman pendidikan bagi kolonial diterapkan kurikulum dengan tiga karakteristik, yaitu: *Pertama*, pendidikan menganut sistem dualisme. Sistem ini membedakan pendidikan bagi golongan Eropa dan Bumiputera. *Kedua*, Sistem Concordansi. Sistem ini merujuk pada aplikasi pendidikan bagi golongan Bumiputera dengan kurikulum Belanda. Sistem ini bertujuan untuk mengasihkan jiwa dan pandangan bangsa Indonesia dan diarahkan pada pembentukan jiwa dan budaya asing serta pemujaan terhadap budaya kolonial. *Ketiga*, Sistem Sentralisasi. Kurikulumnya diarahkan untuk meningkatkan taraf kehidupan Bumiputera serta mampu memperkokoh posisi kekuasaan penjajah (Tilaar, 1985: 31-

32). Di sisi yang lain, akan terbentuk manusia jajahan tanpa identitas namun produktif.

Menurut Tilaar (1985: 51-53), sistem tersebut berbeda dengan era pendudukan Jepang. Jepang memfokuskan pendidikan pada upaya penghapusan pengaruh budaya asing dan diganti dengan kebudayaan Jepang serta mengibarkan semangat *Patriotisme Asia Timur Raya*. Hal ini disebabkan karena Jepang memiliki misi untuk menyatukan bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Perombakan kurikulum yang ditempuh adalah dengan memberlakukan pendidikan yang lebih bersifat praktis bukan intelektualistik serta mendekatkan pendidikan dengan kebutuhan riil rakyat dan diberlakukannya sistem kurikulum 6+3+3 yang berlanjut hingga saat ini.

## 2. Pendidikan pada masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan RI belum secara maksimal mengupayakan pendidikan pada rakyatnya, karena beban politis yang besar serta perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sangat menguras tenaga maupun pikiran pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejolak politik yang cukup berat itu, pendidikan tetap dilaksanakan dalam kondisi yang elementary. Era pemerintahan Soekarno mulai menemukan jati diri kebijaksanaan politiknya pada tahun 50-an yang bernuansa sosialis sebagaimana yang terdapat dalam keputusan MPRSno II/MPRS/1960 tentang manusia sosialis, maka pembangunan pendidikan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu tatanan masyarakat adil berdasarkan Pancasila. Pendidikan dikemas sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan *pembantingan setir* dalam segala hal sehingga tujuan pendidikan untuk melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis adil dan makmur dapat terwujud. Menurut Tilaar (1985: 99-101), jiwa kurikulum pendidikan yang disosialisasikan yaitu: 1) Semangat mengemban amanat pendidikan rakyat secara gotong royong; 2) Semangat Demokrasi Terpimpin; 3) Semangat cinta Bangsa; dan 4) Semangat Kepercayaan kepada Tuhan YME.

### 3. Sistem Pendidikan pada Era Soeharto

Seiring dengan pembangunan pada sektor perekonomian yang melonjaknya kebutuhan tenaga terampil dan SDM yang handal, maka pada pembangunan jangka panjang tahap pertama dari pelita satu hingga keempat, pendidikan Indonesia berorientasi pada *human development*. Sistem ini didasarkan atas kesinambungan antara pendidikan dan tenaga kerja sebagai jawaban atas ketidaksinambungan antara *output* pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi sektor perekonomian yang berkembang sangat cepat. Sistem yang dikenal dengan *link and match* ini berpengaruh pada dibukanya sekolah kejuruan yang akan menghasilkan tenaga terampil tingkat menengah serta pelatihan ketrampilan dan kursus.

Tilaar (1985: 142) mengatakan bahwa pada pembangunan jangka panjang tahap kedua sebagaimana tertuang dalam rumusan GBHN 1993 yang menegaskan bahwa PJP II merupakan masa kebangkitan nasional kedua yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan sendiri untuk mewujudkan kehidupan yang sederajat. Dengan rumusan ini, sistem pendidikan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas SDM. Kurikulum yang disusun berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman dan tahapan pembangunan. Kurikulumnya menonjolkan tiga hal yaitu: 1) kurikulum yang fleksibel; 2) kurikulum yang mengembangkan sikap kemanusiaan; 3) kurikulum yang mengembangkan sikap kewiraswastaan.

Menurut Suryadi (1994: 237), salah satu upaya pemerataan pendidikan pada era ini adalah dicanangkannya wajib belajar 9 tahun dengan melibatkan peran swasta yang begitu besar untuk memberikan kontribusi bagi pencerdasan bangsa. Aplikasi kurikulum pendidikan pada PJP II cenderung sentralistik yang berdampak pada pengabaian potensi dan budaya daerah. Sentralisasi ini memicu pada problem ketertinggalan berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Sisi buram pada produk pendidikan PJP I dan II adalah disorientasi tujuan pendidikan dari mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya menjadi berorientasi pada pengembangan iptek namun

terjebak pada pendewaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan robot-robot yang produktif namun tanpa memiliki moral dan miskin iman, atau manusia *work-Aholic* yang gersang dari kehangatan kemanusiaan.

#### 4. Pendidikan pada era Reformasi

Menurut Suryodo (1997: 3-4), pada era reformasi yang berbarengan dengan pergeseran perjalanan kehidupan abad ke 21-an telah mendapatkan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan bernegara. Kalau abad 20 dicirikan sebagai abad revolusi industri kedua, maka era 21-an dicirikan sebagai era globalisasi dan keterbukaan. Keduanya dapat diidentikkan sebagai abad yang penuh perubahan cepat, *diskontinuitas* dan krisis berkepanjangan. Para futurolog jauh-jauh hari telah mengingatkan akan adanya tantangan yang maha dahsyat ini antara lain, Tofler, Francis Fukuyama dan John Naisbit yang mengingatkan bahwa bangsa berkembang termasuk Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi perhelatan global. Belum rampung bangsa Indonesia berkembang termasuk Indonesia mempersiapkan diri, arus globalisasi keburu menghantam ditandai dengan meletusnya batas-batas politik dan ekonomi bangsa sehingga hubungan interdependensi antara negara berkembang kepada negara maju begitu transparan. Indonesia mengalami penjajahan ideologi, politik, keamanan, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa sebuah perlawanan berarti.

Kondisi sosial politik Indonesia mengharuskan pemerintah pada masa Habibie untuk menggolongkan peningkatan pendidikan sains dan teknologi sebagai upaya melawan penjajah di sektor iptek, akan tetapi proyek tersebut terkoyak dengan perubahan konstelasi perpolitikan yang begitu cepat. Sementara itu, pada masa Gus Dur keberhasilan yang mencolok justru terjadi pada pendidikan berpolitik di mana kebebasan dibuka seluas-luasnya yang berdampak pada amunisi bagi pemerintahan sendiri dengan jatuhnya Gus Dur dari kekuasaan. Pada pemerintahan Megawati dan dilanjutkan pemerintahan Indonesia bersatu disusun pendidikan berbasis kompetensi yang tidak lagi sentralistik namun lebih memberikan kesempatan pada pengembangan potensi dan budaya daerah, di satu sisi mengacu pada kompetensi atau kemampuan dan ketrampilan pada tiga aspek

pendidikan yaitu, *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*. Menurut Freire dkk. (1999:138) kurikulum dengan basis kompetensi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas orientasi kognitif *ansich* pada kurikulum yang telah berlaku sehingga peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan (*learn to know*), memiliki skill dalam mengaplikasikan keilmuan (*learn to do*), memiliki sikap dan kepribadian (*learn to be*), dan akan menghasilkan *output* pendidikan yang memiliki kesalehan sosial (*learn to life together*).

Konsep general edukasi yang diaplikasikan pada sistem KBK merupakan respon atas carut marutnya wajah pendidikan yang sangat memprihatinkan, baik dari sisi kualitas intelektual maupun integritas moral serta semangat nasionalisme dan patriotisme yang diharapkan dapat menjawab krisis produk pendidikan yang sedang melanda negara Indonesia.

Pasca jatuhnya pemerintahan Megawati yang dilanjutkan pemerintahan selanjutnya dunia pendidikan masih terus mengharapakan peran pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem yang handal sehingga menghasilkan *output* pendidikan yang dapat bersaing dan berkualitas. Menilik dari kebijakan politik pemerintahan Indonesia bersatu saat ini tampak bahwa kebijakan sektor pendidikan masih tambal sulam dan cenderung memberikan kepuasan sesaat bagi rakyat bukan kebijakan strategis yang dapat mendongkrak mutu pendidikan dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan pendidikan yang dirasa sebagai “lipstik” semata dapat dilirik sebagai upaya pemerintah menenangkan masyarakat dan menciptakan stabilitas serta kepercayaan dan harapan cemerlang atas pemerintahan yang baru. Seperti dengan diberlakukannya kebijakan untuk tidak mengganti buku panduan belajar tingkat dasar, menengah dan umum selama lima tahun serta penyertaan *output* pendidikan dalam dunia kerja dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil besar-besaran serta ramainya dibuka bursa kerja di kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Pemda (Siaran Radio Elshinta News and Talk FM: Pukul 6-9 WIB). Kebijakan ini pun tidak terlepas dari trik politik untuk mengurangi beban politis penguasa karena dengan besarnya jumlah pengangguran akan berdampak pada melebarnya kelas ekonomi serta rawan terhadap munculnya keresahan sosial.

Agaknya pemerintahan sekarang tidak mau dipusingkan dengan kondisi kesenjangan sosial yang ada. Bagi praktisi pendidikan, sebenarnya yang lebih penting dari penciptaan stabilitas sosial walaupun itu juga penting adalah kebijakan pendidikan yang strategis bagi peningkatan sumber daya yang berkualitas.

Terakhir, pada masa pemerintahan SBY, juga menginginkan upaya peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa ini. Ketika pada era pemerintahan sebelumnya, telah terdapat konsensus bersama dalam memberlakukan rekonstruksi kurikulum dengan KBK-nya, namun dalam era sekarang ini juga terdapat perbaikan-perbaikan kurikulum dengan KTSP-nya, yang sekarang sudah masuk dalam lini birokrasi pendidikan di Indonesia masih dalam proses. Sesungguhnya, KBK dan KTSP yang menjadi *ruhiyah* memiliki kemiripan, yang secara substansi memiliki banyak persamaan dalam menghasilkan *out put* yang berkualitas.

Dari sisi lain, pemerintah SBY telah mencanangkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan target 20% dalam kerangka upaya peningkatan kualitas pendidikan kita, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Namun pada proses pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat tarik menarik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

### **Kecenderungan Pergeseran Orientasi Kebijakan di Bidang Pendidikan**

Realitas interdependensi antara politik dan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam data di atas ataupun sebaliknya pengaruh pendidikan pada politik merupakan sebuah keniscayaan. Keniscayaan tersebut dapat diruntut dari substansi politik sebagai segi kehidupan bersama dalam masyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan dan *power relationship* (Gani, 1987:16-17). Politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar dan mempertahankan kekuasaan merealisasikan tujuannya dalam berbagai kebijakan yang terkait kebutuhan hidup masyarakat. Di sisi lain, pendidikan sebagai proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global memberikan kontribusi sangat



besar bagi pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu pilar tegaknya pembangunan (Tilaar, 1999:28). Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang apapun tidak dapat terlepas dari kondisi *output* pendidikan karena sektor inilah yang memasok kebutuhan manusia trampil dan handal demi keberhasilan pembangunan. Postulat ini pun dapat dibalik bahwa kualitas masyarakat dengan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi konstelasi perpolitikan sebagaimana rakyat yang cerdas hanya akan memilih pemimpin yang cerdas, rakyat yang berpendidikan akan memilih para wakil legislatif yang berpendidikan pula sehingga anggota MPR dan DPR merupakan kumpulan para pemikir rakyat yang cerdas bukan kumpulan para penjiilat. Demikian halnya pendidikan dengan sistem doktrin dan sentralisasi sebagaimana pada masa Orba akan membentuk sistem politik *oligarki otoritarianistik*. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan yang terbuka yang mampu menciptakan suatu sistem politik yang transparan dengan aktifnya kontrol sosial masyarakat. Dari asumsi ini, mutu pendidikan suatu negara dapat dilihat dari agen politik yang bermain di dalamnya.

Menurut Ma'arif (2002:8), untuk mengoperasikan teori di atas dan menelaah pergeseran kebijakan penguasa pada sektor pendidikan dapat diketahui bahwa dengan parameter kuantitatif, pembangunan pendidikan menunjukkan angka spektakuler. Prosentase buta aksara dapat ditekan menjadi sekitar 15% dibanding pada awal kemerdekaan mencapai 90%. Keberhasilan itu merupakan buah dari politik pendidikan massal sebagai antitesis dari politik elitis kolonial. Bangsa Indonesia boleh berbesar hati melihat perkembangan pendidikan dalam tinjauan historisitas namun kalau dibandingkan dengan negara lain rasa besar hati dapat berubah menjadi kecut hati karena jauh tertinggal baik sisi kualitas maupun kuantitas. Pada pemerintahan Soeharto yang memfokuskan pada konsep pendidikan *link and match* ternyata dari data statistik orientasi tersebut belum dapat mendongkrak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1995 yang mencapai 8,1% tidak seimbang dengan pendapatan perkapita US\$ 1,023 yang merupakan angka terendah di lingkungan negara Asean. Fenomena ini dapat dianalisa bahwa secara teoritis formulasi pembangunan berupa: "Pembangunan masyarakat Indonesia

seutuhnya “ atau “Pembangunan material dan spiritual”. Adalah sebuah kebanggaan dari sisi motto namun dari sisi implementasi berubah menjadi “Pembangunan masyarakat Indonesia yang retak” karena terjadi keretakan yang cukup parah antara yang tertulis dengan yang terlaksanakan, sehingga kebocoran dana pembangunan mencapai 30% angka ini terus melonjak pada era reformasi sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kelima sedunia.

Kerangka berfikir yang dapat dijadikan telaah terhadap orientasi pendidikan berbasis bangsa pasar adalah teori *human capital* yang menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena peran pendidikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini yakin bahwa pertumbuhan masyarakat dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan tinggi karena pendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang. Namun, dalam kenyataannya realitas ini berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia, pendidikan formal hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap status pekerjaan. Kegagalan teori *human capital* yang menandakan bahwa lulusan pendidikan belum siap bekerja sesuai dengan harapan lapangan kerja dijawab oleh teori *kredensilisme*. Teori ini menganggap bahwa struktur masyarakat lebih ampuh dari pada individu dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan, sebab pendidikan formal sering dianggap sebagai alat mempertahankan status quo dari para pemegang status sosial. Teori ini melihat pendidikan formal tidak lebih dari suatu lambang status melalui perolehan ijazah dan bukan produktivitas. Dari teori ini fungsi pendidikan formal tidak akan menghasilkan tenaga terampil bekerja, tetapi hanya pelatihan kerja sebagai media strategis dalam menjembatani antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kegagalan pendidikan pada PJP II di mana masih banyak pengangguran *output* pendidikan merupakan gejala ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat dilatih atau yang dapat membelajarkan diri menjadi tenaga terampil sesuai kebutuhan pasar.

Sejak pembangunan Orde Baru hingga masa Reformasi problem yng dihadapi dunia pendidikan adalah besarnya jumlah pengangguran

terdidik yang berakses pada problem ketenagakerjaan dan sosial yang disinyalir merupakan produk dari sistem pendidikan yang tidak berkualitas. Problem besar itu merupakan buah dari sistem pendidikan yang menekankan pada fungsinya sebagai pemasok tenaga kerja terdidik (*driving force*). Program pendidikan formal lebih bertujuan membentuk lulusan yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan dari pada menguasai kemampuan dan kemauan belajar. Jika kemampuan dan kemauan belajar ditumbuhkan, lulusan akan menjadi tenaga kerja kreatif sehingga pengetahuan dan ketrampilan menjadi model dalam mengembangkan diri di masyarakat dan dunia kerja.

### **Rekonstruksi *Political Education*: Sebuah Solusi alternatif**

Bermula dari pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia yang berarti juga berimplikasi pada lahirnya, berbagai problematika muncul di permukaan, maka sudah barang tentu mengundang pula keprihatinan para pakar pendidikan di Indonesia, sebagaimana menurut Fadjar (2004: 7), yang melukiskan suatu sintesa, konvergensi, dan sinergisitas dualisme-dikotomik. Ia (Fadjar, 2004:6-7) juga mengungkapkan bahwa menurutnya, integralisasi tersebut dapat melahirkan kesatuan antara *moralitas-rasionalitas, ruhaniah-jasmaniah*. Selanjutnya, menurut Hasan (2004: 247), perlu upaya menyuarakan wacana “pendidikan berbasis masyarakat” (*Community Based Education*).

Statemen terakhir, dijelaskan bahwa ada beberapa model keterlibatan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang diusulkan sebagai berikut: (1) Berupa dukungan (*support*), dalam arti orang tua dan anggota masyarakat memberikan sumbangan dana atau tenaga (2) Keterlibatan (*involvement*), orang tua dan anggota masyarakat terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan masalah pendidikan (3) Kemitraan (*partnership*), orang tua dan anggota masyarakat menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah/madrasah dalam menentukan hal-hal yang berhubungan pengelolaan pendidikan (4) Kepemilikan penuh (*full ownership*), para orang tua dan masyarakat mengendalikan semua kebijakan/ keputusan tentang program pendidikan (Nielson, 2000: 178-179).

Realitas kebijakan politik terhadap pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan Islam pada masa pemerintahan SBY sekarang, agar pendidikan di Indonesia lebih nampu menatap masa depan dan dapat diperhitungkan, terutama pendidikan Islam agar dijadikan pilihan, maka setidaknya ada beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai berikut: *Pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. *Kedua*, pemberdayaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaruan, dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. *Keempat*, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan (Fadjar, 1998:13).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Djojonegoro (1995: 124) berpendapat bahwa ada berbagai kecenderungan yang menentukan arah pembaharuan pendidikan itu yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan sumber daya manusia 2) Dalam dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata (*what one can do*) yang dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan harus semakin kuat 3) Sebagai dampak globalisasi, maka mutu pendidikan suatu negara tidak hanya akan diukur berdasarkan kriteria dalam negara itu, melainkan dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, berbagai tawaran alternatif yang dimaksudkan, sesungguhnya secara substansi hanya bertumpu pada kurikulum. Hal ini, ditegaskan Ghony (2007: 13-14), dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setidaknya ada tiga lingkaran yang melingkupi kurikulum itu, yaitu, politik kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan eksistensi.

## **Kesimpulan**

Menurut Maliki (2003: 27-29) carut marutnya wajah pendidikan di Indonesia sebagai produk dari kepentingan politik penguasa menempatkan pendidikan sebagai salah satu alat kekuasaan. Realitas ini dapat dibaca dari teori fungsional *Durkheimian* yang memandang bahwa masyarakat sebagai unifikasi dari berbagai macam subsistem akan berjalan efektif jika setiap subsistem digerakkan untuk mendukung sistem yang ada. Demikian pula dengan pendidikan

sebagai subsistem dari negara jika difungsikan sebagai alat pemasok kalangan terdidik maka dapat mensukseskan pembangunan. Jika pembangunan diorientasikan untuk mencukupi kebutuhan rempah-rempah dan kejayaan alam negeri penjajah maka pendidikanpun diformat untuk mencetak tenaga kasar dan buruh. Hal ini berbeda dengan masa Jepang yang menginginkan kepemimpinan Asia Timur Raya maka pendidikan difokuskan pada penumbuhan semangat patriotisme bangsa Asia. Berbeda lagi pada masa Soekarno yang sosialis, pendidikanpun digerakkan berdasarkan dengan asas gotong royong. Sementara pada era Soeharto yang memproklamirkan diri sebagai "Bapak Pembangunan" maka pendidikanpun diformat untuk mencetak tenaga terampil penopang kesuksesan dan pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sementara pada era pemerintahan Indonesia Bersatu agaknya orientasi pendidikan masih berkuat untuk menyelesaikan kerikil-kerekil penghambat pendidikan yaitu membludaknya angka pengangguran, meskipun banyak juga para pakar pendidikan kita yang berusaha memberikan tawaran alternatif dalam penyelesaiannya.

Demikianlah realitas politik bangsa tercinta ini dalam menyikapi problematika pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya melanggengkan kekuasaan dengan memfungsikan berbagai subsistem, sehingga termasuk sektor pendidikan dijadikan sebagai sarana dan wadah untuk menyukseskan kebijakan yang dilancarkannya dalam menggapai tujuan dan cita-cita utama kepemimpinannya. Tentunya aktor politik yang bertanggung jawab akan menghantarkan masyarakatnya pada kejayaan sebuah negeri yang ideal sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an "*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur*", demikian pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Modern*. Jakarta: Logos.
- Nielson, Dean. 2000. "Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia" dalam *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Djojonegoro, Wardiman. 1995. "Transformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM" dalam *ICMI, Beberapa Catatan Kritis*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara
- Fadjar, Malik, A. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Penerbit Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Sintesa antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren: Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif*. Malang: Universitas Islam (UIN) Malang.
- Ghony, Djunaidi, M. 2007. "Paradigma Pengembangan Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam" dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Gruru Besar UIN Malang*. Malang: UIN Malang.
- Freire, Paulo, dkk. 1999. *Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberalis, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ismail Ghani, Soelistiyati. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Saadiyah.
- Maarif, Syafii. 2002. *Posisi Umat Islam dalam Konteks Pembangunan Nasional dalam Tantangan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Mufrodi, Ali. 1980. "Metode Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Islam" dalam Makalah: *Metode Penelitian dalam Sejarah*. Surabaya: T.p.
- Thalhah Hasan, Muhammad. 2006. *Dinamika pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Lantabora Press.
- Maliki, Zainudin. 2003. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemoni*. Surabaya: Lpam.
- Leirisa, R.Z.. tt.. *Masyarakat Indonesia, 1900-1950*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R.. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Rosda Karya.
- Suryadi, Ace. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya.
- Surya, Djoko. 1997. *Membangun Visi ke Depan: Refleksi atas Masalah Pembangunan dalam Tantangan Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Siaran Radio Elshinta, News And Talk FM., pukul 6- 9 WIB.